

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

(Studi Kasus di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan Kecamatan
Gemolong Kabupaten Sragen)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ANNISA SAFITRI
C100140286

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

(Studi Kasus di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan Kecamatan
Gemolong Kabupaten Sragen)

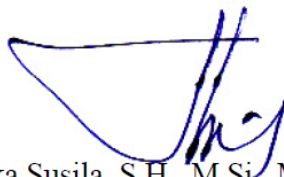
PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ANNISA SAFITRI
C100140286

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.

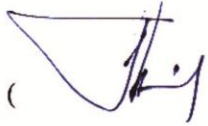


HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
(Studi Kasus di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)**

Oleh:
ANNISA SAFITRI
C100140286

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 27 Maret 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Penguji

Ketua	: Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.	()
Sekretaris	: Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.	()
Anggota	: Dr. Nuria Siwi E, S.H., M.H.	()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

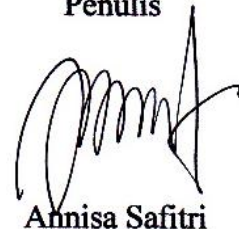
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Maret 2018

Penulis



Annisa Safitri

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan)

ABSTRAK

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, keberadaan desa disini diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Meskipun keberadaan Desa diakui dan dihormati dalam sistem Negara Indonesia namun keberadaan Desa sewaktu-waktu bisa dihapuskan, digabung dan diubah. Hal tersebut sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Peraturan Daerah tersebut mengubah empat Desa di Kecamatan Gemolong menjadi Kelurahan. Dengan adanya perubahan tersebut berimplikasi terhadap status para perangkat Desa dan kekayaan Desa. Implikasi Terhadap Para Perangkat Desa hanya berubah penyebutannya yang awalnya perangkat Desa berubah menjadi Perangkat Daerah Non-PNS. Sedangkan untuk kekayaan Desa setelah adanya perubahan secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah, penggunaan kekayaan Desa berupa tanah sawah dilelang kepada masyarakat setempat pertahun dan hasilnya untuk kesejahteraan Kelurahan, namun kenyataannya tingkat kesejahteraan Kelurahan masih di bawah Desa.

Kata Kunci : Perubahan Status, Perangkat Desa, Kekayaan Desa

ABSTRACT

Village is a unit of law society which has territorial boundaries and authority to regulate and manage its own household based on local origins and customs, the existence of the Village here is recognized and respected in the Indonesian Government System. Although the existence of the Village is acknowledged and respected in the Indonesian Government System but the existence of the Village may be abolished at any time, merged and changed. This is in accordance with the provisions of Law Number 22 of 1999 regarding Local Government, thus the Village may be changed its status into Urban Village. Urban Village is a set of Sub-district led by Village chief that the position is under by Sub-district chief and responsible to the Sub-district chief. Based on the Local Regulation of Sragen Regency Number 29 of 2003 regarding the changing of Village status into Urban Village. The Local Regulation is changing four villages in Gemolong Sub-district into Urban Village. With the changes that has implications for the status of the officer of

Urban Village and Village riches. implications for the status of the officer of Urban Village just changes its mention that initially the Officer Village turned into Officer of area Non-Civil Servants. As for the riches of the village automatically changes become the property of the Local Government, the using of village riches in the form of rice field auctioned to the local community per year and the results for the welfare of Urban Village, but in reality the welfare of the Urban Village is still below the Village.

Keywords: Status Changes, Officer of Village, Village Riches

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah.¹ Sementara itu, dengan penerapan sistem desentralisasi telah menyebabkan pula terjadinya pergeseran atau pengalihan kewenangan pengurusan dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah baik pada tataran provinsi, kabupaten maupun kota.²

Desentralisasi merupakan cara yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang demokratis dalam suatu negara, karena sebagian kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga bisa aktif dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.³ Pemerintahan desentralisasi merupakan hakikat dari Otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945. Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan kemudian menjadi urusan rumah tangga daerah.⁴ Dalam menyelenggarakan pemerintahannya Daerah Indonesia terdiri atas beberapa Daerah/wilayah

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.1.

² Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal.3.

³ D. Juliantara dkk, 2006, *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis*, Bantul, Pondok Edukasi, hal.55.

⁴ Inu Kencana Syafie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hal. 55

provinsi dan setiap Daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam tiap Daerah Kabupaten/Kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan.⁵

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dalam ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Meskipun keberadaan Desa di akui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menutup kemungkinan kedudukan desa dapat dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) menjelaskan bahwa desa dapat dibentuk, dihapuskan, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD. Selain Desa, Kelurahan juga merupakan instansi pemerintahan terkecil di daerah dimana kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju maka status desa dapat diubah menjadi kelurahan. Dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan berarti ada pula campur tangan dari pemerintah daerah dalam mengelola Kelurahan dalam hal kekayaan maupun pendanaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 201

⁵ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, hal. 1.

⁶ *Ibid*, hal.2.

- 1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota
- 2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan juga di laksanakan di kabupaten Sragen. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 29 tahun 2003 mengenai perubahan status dari desa menjadi kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sragen tersebut menjadikan Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen berubah status menjadi Kelurahan Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen. Tidak dipungkiri lagi dengan ada perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang terjadi di kabupaten Sragen terjadi pula perubahan struktur organisasi pemerintahan, kekayaan, keuangan serta kewenangan.

Ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, yang awalnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap status perangkat desa yang berubah menjadi perangkat kelurahan dan (2) Bagaimana implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui secara jelas dan menganalisis bagaimana implikasi Perubahan status

⁷ Amin Suprihatini, 2007, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Klaten, Cempaka Putih, hal. 18.

desa menjadi kelurahan terhadap kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan dan (2) Mengetahui secara jelas dan menganalisis bagaimana implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap status perangkat. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya mengenai Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya dan untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.⁸ Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan tujuan penelitian ini memberikan gambaran dan deskripsi implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan. Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data primer berupa sejumlah keterangan maupun fakta secara langsung dan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan segenap Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan Kwangen dan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Setelah semuanya terkumpul kemudian dilakukan analisis data, adapun metode analisis data yang dilakukan Penulis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada, Hal.52.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Status Perangkat Desa

3.1.1 Terhadap Status Perangkat Desa

Dalam pemerintahan Desa, terbagi dalam dua lembaga yaitu Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa pasti akan saling berkaitan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis serta perangkat desa lainnya. Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) atau nama lain dari perangkat Desa, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kaur Keuangan, Kaur Umum serta Kepala-kepala Dusun.¹⁰ Dengan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka berubah juga susunan organisasi pemerintahannya.

Setelah Desa Kwangen dan Desa Kragilan mengalami perubahan menjadi Kelurahan Kwangen dan Kragilan, maka susunan organisasi pemerintahannya menyesuaikan Kelurahan. Jika di pemerintah Desa dikenal dengan istilah Kepala Urusan (Kaur) namun di pemerintah Kelurahan dikenal dengan istilah Kasi (Kepala Seksi).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003, dalam ketentuan Pasal 5:

⁹ Emi, 2015, Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai, Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, hal. 1920

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Lurah Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen diangkat menjadi Perangkat Daerah dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan berupa bengkak yang luasnya sama dengan bengkak Lurah Desa yang bersangkutan atau penghasilan lain yang senilai sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Pamong Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen diangkat menjadi Perangkat Daerah dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan berupa bengkak yang luasnya sama dengan bengkak Pamong Desa yang bersangkutan atau penghasilan lain yang senilai sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Lurah Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Berarti adanya pemberhentian Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan dari masa jabatannya dan digantikan dengan sebutan perangkat Daerah dengan status Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), satus Non-PNS berlaku sampai dengan masa pensiun apabila setelah melewati masa pensiun barulah diisi PNS.

Sebelum adanya pengangkatan Perangkat Daerah dengan status Non-PNS, terlebih dahulu dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen. Sedangkan pengangkatan Perangkat Daerah Non-PNS dilakukan oleh Pemerintah Daerah.¹¹ Berdasarkan surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/19-11/2004 tentang Pengangkatan Lurah Desa dan Pamong Desa Gemolong,

¹¹ Karyoto, Sekretaris Kelurahan, Wawancara Pribadi , Sragen, Senin 18 Desember 2017, Pukul 10.30 WIB.

Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong menjadi Perangkat Kelurahan Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.¹²

Di Kelurahan Kragilan, pada awal sebelum adanya perubahan desa menjadi kelurahan, semua perangkat tersebut masih aktif dengan sebutan Perangkat Daerah Non-PNS sampai masa pensiun, dalam perkembangannya apabila sudah masuk masa pensiun baru di isi Perangkat Daerah yang berstatus PNS. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Di kelurahan Kragilan sendiri mulai ada pengisian Perangkat kelurahan yang berstatus PNS pada tahun 2009 yaitu untuk menduduki jabatan sebagai Kasi Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat.¹³ Dalam perkembangannya masih ada perangkat Kelurahan yang belum berstatus PNS, diantaranya yaitu Kasi Pemerintahan dan Kepala Lingkungan sebanyak 2 orang.¹⁴

Sementara itu tidak berbeda jauh dengan Kelurahan Kragilan, berdasarkan wawancara dengan Endang selaku Kepala Kelurahan Kwangen, jumlah perangkat Desa di Kelurahan Kwangen sebelum adanya perubahan ada 8 orang, setelah ada perubahan ke 8 perangkat desa tersebut masih aktif bekerja, namun tidak lagi sebagai perangkat Desa melainkan Perangkat Daerah Non-PNS. di Kelurahan Kwangen baru ada pengisian Perangkat Kelurahan yang berstatus PNS pada tahun 2004 yaitu untuk menduduki jabatan sebagai KASI (Kepala Seksi) Kesra. Selain Kasi Kesra perangkat Kelurahan yang berstatus PNS lainnya yaitu Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Kasi Trantip.¹⁵ Selain Perangkat yang berstatus sebagai PNS, jabatan yang lain di isi oleh

¹² Karyoto, Sekretaris Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin 18 Desember 2017 pukul 10.30 WIB.

¹³ Karyoto, Sekretaris Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin 18 Desember 2017, Pukul 10.30 WIB.

¹⁴ Karyoto, Sekretaris Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin Tanggal 18 Desember 2017 pukul 10.30 WIB.

¹⁵ Endang, Kepala Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin 11 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB.

Perangkat Daerah Non-PNS. yaitu menduduki jabatan sebagai Kepala Lingkungan sebanyak 3 orang dan Kasi Pemerintahan.¹⁶

3.1.2 Terhadap Upah Perangkat Desa

Selain mengubah status para perangkat Desa menjadi Perangkat Kelurahan, perubahan status desa menjadi kelurahan juga mengubah keuangan Desa. Arti keuangan di sini yaitu lebih ke upah/gaji yang diterima oleh para perangkat desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Karyoto selaku sekretaris Kelurahan Krgilan, upah/gaji yang diterima oleh perangkat yang berstatus Non-PNS dengan perangkat yang berstatus PNS berbeda. Bagi Perangkat Kelurahan yang melanjutkan jabatannya atau sebagai perangkat Daerah Non-PNS diberikan gaji UMKab (Upah Minimum Kabupaten) kurang lebih Rp. 700.000,- beserta bengkok berupa sawah yang luasnya sesuai dengan jabatannya sebelumnya, sedangkan untuk perangkat Kelurahan yang berstatus PNS diberikan upah gaji standar Nasional PNS yaitu kurang lebih Rp.3.000.000,-.¹⁷

3.2 Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Kekayaan Desa

Desa mempunyai hak otonomi, sebagai akibat dari adanya hak otonomi tersebut desa mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli daerah dan pemberian Pemerintah Daerah . pendapatan asli Daerah sendiri terdiri dari hasil tanah kas Desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, hasil usaha desa maupun hasil dari gotong royong masyarakat dan lain-lain. Sedangkan pendapatan yang berasal atau pemberian Pemerintah Daerah

¹⁶ Hasan, Kepala Lingkungan Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin 11 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Karyoto, Sekretaris Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin 18 Desember 2017, Pukul 10.30 WIB.

terdiri atas dari sumbangan dan bantuan dari Pemerintahan Daerah serta sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.¹⁸

Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka kekayaan Desa secara otomatis beralih menjadi milik Daerah. Ketentuan mengenai perubahan status kepemilikan kekayaan Desa tersebut terdapat dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 tentang perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dalam ketentuan Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, menjadi milik pemerintah Kabupaten dan proses peralihan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kekayaan Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diatur penggunaannya sebagai berikut:
 - a) Hasil pengelolaan tanah kekayaan Kelurahan yang disewakan/dilelangkan penggunaannya diatur oleh pemerintah Kabupaten, 60% untuk Kelurahan yang bersangkutan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, 40% untuk Pemerintah Daerah.
 - b) Hasil penjualan/ganti rugi/pelepasan tanah kekayaan Kelurahan penggunaannya diatur oleh pemerintah Kabupaten, 75% untuk kelurahan yang bersangkutan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 25% untuk pemerintah Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Karyoto selaku Sekretaris Kelurahan Kragilan, pelepasan seluruh kekayaan Desa serta sumber-sumber pendapatan Desa Kragilan sebagai akibat dari perubahan Desa menjadi Kelurahan baru terjadi pada tahun 2004. Setelah adanya berita acara Nomor 140/02/2004 yang berisi penyerahan aset Desa Kragilan

¹⁸ A.W. Widjaja, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah Tinjauan), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 63.

Kecamatan Gemolong sebagai akibat perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yang ditandatangani oleh Lurah Desa Kragilan beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Dengan demikian seluruh aset serta kekayaan Desa secara resmi menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Penyerahan seluruh kekayaan desa serta sumber-sumber pendapatan Desa terjadi karena adanya aturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa sebagai akibat dari perubahan Desa menjadi Kelurahan maka seluruh kekayaan Desa menjadi milik Pemerintah Daerah.¹⁹

Di kelurahan Kragilan sendiri Penggunaan kekayaan Desa sebagai akibat dari perubahan menjadi Kelurahan, tanah Bengkok berupa sawah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dilalukan Pelelangan kepada warga masyarakat Kragilan, pelelangan tersebut dilakukan tiap tahun. Hasil dari lelang semuanya diserahkan kepada Pemda Kabupaten Sragen. Hasil tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan guna kesejahteraan Kelurahan. Namun, kenyataanya tingkat kemajuan Kelurahan dari segi Infrastruktur jauh tertinggal dari Desa-Desa di Kecamatan Gemolong lainnya.

Dalam perkembangannya pembagian hasil pengelolaan tanah kekayaan 60% untuk Kelurahan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum terealisasi secara maksimal. . Pada tahun ini hanya berapa persen saja yang bisa dimanfaatkan oleh Kelurahan guna membiayai pembangunan. Selain itu anggaran yang didapat guna membiayai operasional kantor dari dari anggaran dana rutin tiap taun melalui alokasi anggaran SKPD oleh Bappeda dirasa masih jauh tertinggal dibandingkan Desa. Sementara itu untuk masyarakat yang membutuhkan dana guna memajukan Kelurahan mengajukan proposal secara mandiri kepada DPRD. Sedangkan dalam hal pembangunan wilayah, Kelurahan mendapatkan dana dari DPU. Namun dana tersebut

¹⁹ Karyoto, Sekretaris Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin Tanggal 18 Desember 2017 Pukul 10.30 WIB.

sangatlah minim sehingga mengakibatkan sebagian besar pembangunan di Kelurahan Kragilan mengalami ketertinggalan.²⁰

Sejak tanah kekayaan Desa yang mengalami perubahan menjadi Kelurahan, hal tersebut berarti Kelurahan tidak bisa secara langsung mengelola seluruh kekayaan tersebut karena sudah diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu di Kelurahan Kwangen yang juga mengalami perubahan, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hasan selaku Kepala Lingkungan di Kelurahan Kwangen. penggunaan kekayaan Desa sebagai akibat adanya Perubahan status Desa menjadi Kelurahan oleh Pemerintah Daerah dilakukan juga pelelangan kepada seluruh warga Kelurahan Kwangen. Kekayaan Kelurahan berupa tanah persawahan atau bengkok dilelang kepada warga masyarakat setiap tahun, yang mana hasil dari lelang tersebut digunakan untuk kemakmuran atau membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.²¹

Tidak berbeda jauh dari Kelurahan Kragilan, di Kwangen sendiri pembagian 60% untuk Kelurahan yang bersangkutan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga belum berguna secara maksimal. Bahkan pembagian hasil pengelolaan tanah kekayaan Kelurahan cenderung lebih banyak untuk Pemerintah Daerah dibandingkan untuk Kelurahan.²²

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik Kesimpulan :

Pertama, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa, tidak menutup kemungkinan juga desa sewaktu waktu bisa

²⁰ Suparmin, Kepala Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Kamis Tanggal 21 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB.

²¹ Hasan, Kepala Lingkungan Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin 11 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB.

²² Hasan, Kepala Lingkungan Kelurahan, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin 11 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB.

berubah atau bahkan dihapuskan keberadaannya. seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen, khususnya di empat Desa yang ada di Kecamatan Gemolong berubah menjadi Kelurahan. Dengan adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan berimplikasi juga terhadap status perangkat Desa yang mengalami perubahan. Perangkat desa yang ada di Desa tersebut setelah adanya perubahan menjadi Kelurahan berubah juga statusnya menjadi Perangkat Daerah Non-PNS, pengisian perangkat yang berstatus PNS terjadi setelah perangkat Non-PNS mengalami masa pensiun. Dengan demikian setelah adanya perangkat kelurahan yang berstatus PNS, antara perangkat yang berstatus PNS dengan Non-PNS terdapat perbedaan yang sangat menonjol yaitu dalam hal upah/gaji.

Kedua, Kelurahan berimplikasi juga terhadap perubahan kekayaan Desa, dengan berubah menjadi Kelurahan secara otomatis seluruh aset desa secara otomatis menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sragen. Penggunaan kekayaan Desa yang berupa tanah sawah dilelang kepada warga kelurahan sendiri pertahun. Hasil dari lelang tersebut diserahkan semuanya ke Pemerintah Kabupaten Sragen kemudian digunakan untuk Kelurahan dengan pembagian 60% untuk Kelurahan 40% untuk Pemerintah Kabupaten. Namun kenyataannya tingkat kemakmuran Kelurahan masih sangat kurang baik dalam segi Infrastruktur dan lain lain.

4.2 Saran

Pertama, penulis memberikan saran kepada pemerintah maupun warga masyarakat yang menghendaki adanya perubahan. Dalam melakukan perubahan perlu dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu. Agar tidak terjadi kesenjangan terhadap para perangkat desa. Karena para perangkat desa tersebut sudah bekerja untuk Desa mulai dari nol. Setelah ada perubahan menjadi Kelurahan nasib para perangkat Desa tersebut sangat berbeda apalagi setelah adanya droping perangkat Kelurahan yang berstatus PNS.

Kedua, penulis memberikan saran kepada pemerintah supaya pihak pemerintah lebih memikirkan dalam hal pemberian dana kepada Kelurahan

agar tidak tertinggal dengan Desa yang setiap tahun mendapatkan bantuan yang lumayan cukup banyak. Sedangkan Kelurahan untuk mendapatkan dana harus berusaha semaksimal mungkin terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP

D. Juliantara dkk, 2006, *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis*, Bantul, Pondok Edukasi.

Inu Kencana Syafiie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Amin Suprihatini, 2007, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Klaten, Cempaka Putih.

A.W. Widjaja, 1996, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah Tinjauan)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Jurnal

Emi, 2015, Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 4, hal. 1920